

Analisis Efektivitas PAD Dan Upaya Peningkatan Di Kabupaten Bungo Tahun 2007-2012

Wahyu Pangestuning Margono

Prodi Keuangan Daerah FEB Universitas Jambi

Email :

Abstract

Revenues derived from regional tax revenues and levies, regionally owned company (BUMD) revenues and other legitimate revenues collected by Bungo regional regulations in accordance with the law are calculated in dollars. In running the government to achieve development, the regional government needs a source of PAD, taxes, regional levies, company profits, other legitimate income. The research was conducted at Bungo. The data used is a secondary data source through the realization of revenue in the area of the Bungo Revenue Service and Asset Management (DPPKA) office and the Bungo Central Bureau of Statistics (BPS). This research is a quantitative research. These results indicate that local taxes, affluent levies, (company) profits, make a small contribution to strip income, and that the contribution is large to other legitimate revenues. However, the level of effectiveness is very effective with an average of 102.23%. However, it must be mentioned that the improvement is the result of maximizing PAD revenue. Based on this research, it can be suggested to the government to formulate appropriate policies that will lead to the development of increased local and regional original income.

Keywords: *effectiveness, PAD efforts to increase*

Abstrak

Pendapatan diperoleh pendapat pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (BUMD) dan lain pendapatan yang sah yang dikumpulkan oleh peraturan daerah Bungo sesuai dengan hukum dihitung dalam satuan dolar. Dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai pembangunan pemerintah daerah membutuhkan sumber PAD pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan, pendapatan yang sah lainnya. Penelitian dilakukan di Bungo. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder melalui realisasi penerimaan di wilayah kantor Dinas Pendapatan Bungo dan Asset Management (DPPKA) dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi makmur, laba (perusahaan), memberikan kontribusi kecil untuk strip Pendapatan, dan bahwa kontribusi besarnya pendapatan yang sah lainnya. Namun, tingkat efektivitas yang sangat efektif dengan rata-rata 102,23%. Namun, harus menyebutkan perbaikan menjadi hasil penerimaan PAD lebih maksimal. Berdasarkan penelitian ini dapat disarankan kepada pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat akan mengarah pada pengembangan peningkatan Pendapatan Asli lokal dan regional.

Kata kunci: efektivitas, PAD upaya peningkatan

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia di suatu sisi telah membawa dampak pada tingkat kemiskinan, namun disisi lain krisis tersebut telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu unsure reformasi total itu adalah tuntutan pemberian Otonomi yang muncul sebagai jawaban munculnya era baru, keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan yang diderita bangsa. Untuk itu MPR-RI mengeluarkan Ketetapan Nomor IV/MPR/200 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pad pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu upaya PAD maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagai mana Efektifitas penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo dan bagaimana upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan perumusan masalah yang di temukan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektifitas penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo dan untuk menetapkan upaya peningkatan PAD di Kabupaten Bungo.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori Keuangan Negara

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah berdasarkan kepmendagri No.29 tahun 2002 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah menggunakan sejumlah kata kunci yang dapat mengantarkan kalian untuk lebih mengenal berbagai istilah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh

pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah, yaitu:
2. Hasil Pajak Daerah
3. Hasil Retribusi Daerah
4. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Dana Perimbangan
6. Pinjaman Daerah
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Efektifitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif

Penelitian terdahulu

1. Penelitian oleh Ahmat Raja Nasution tentang “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara substantif dalam mengatur organisasi perangkat Daerah Pasar Kota Medan sebagai salah satu BUMD.
2. Usman (1997), meneliti peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Madya Bandar Lampung. Usman menyimpulkan bahwa PAD pemerintah daerah Kotamadya Bandar Lampung mampu menyumbangkan 26% dari anggaran daerah. Ditambahkan juga, kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah daerah Bandar Lampung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah intensifikasi dan lebih menekankan pada struktur tarif.
3. Penelitian oleh Ahmad Sofwani Tentang “Mobilisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pembangunan Daerah (Studi Di Kabupaten Muara Enim) Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis serta studi pustaka yang penulis lakukan menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi daerah dalam pembiayaan pembangunan adalah kecilnya proporsi dana pembangunan yang berasal dari kewenangan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 1995/1996, dari proyek pembangunan yang berhasil dibiayai oleh dana daerah hanya 2,49%, selebihnya 0,35% dari propinsi dan 97% berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan pada tahun 1997/1998, dari proyek pembangunan yang berhasil dibiayai oleh dana daerah proporsinya meningkat menjadi 30%, selebihnya 1,92% dari provinsi dan 70% dari pemerintah pusat.

Sebagaimana telah di amanatkan oleh undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dimana kepala Kabupaten dan Kota diberi wewenang yang luas, nyata dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan aspirasi masyarakat dengan adanya pendelagasian kewenangan daerah tersebut maka kepada daerah Kabupaten Kota dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis dari sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang mana data sekunder adalah data yang diperoleh dari pegawai kantor dan bersumber dari dokumen-dokumen laporan keuangan kantor, data PAD Kabupaten Bungo tahun 2007-2012 dan juga melalui internet.

PEMBAHASAN

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo Tahun 2007-2012

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan dan pembiayaan bagi pembangunan, penerimaan diupayakan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan PAD suatu daerah diharapkan akan member pengaruh positif terhadap perekonomian daerah sekaligus langkah untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah yang lebih tinggi.

PAD yang besar yang dihimpun suatu daerah akan mendorong tersedianya dana serta menjamin pembangunan tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan penerimaan PAD dapat diupayakan melalui upaya peningkatan penerimaan sumber-sumber PAD itu sendiri yaitu melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Selama periode tahun 2007-2012 efektifitas PAD kabupaten Bungo termasuk dalam kategori sangat termasuk dalam kategori sangat efektifitas dan yang belum terealisasi sngat rendah.

Upaya Untuk Peningkatan PAD

Dalam peningkatan pendapatan daerah ini perlu upaya strategis dengan menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal. Pendapatan daerah terutama diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Pemerintah telah melakukan beberapa pembentukan perda, antara lain :

1. Penetapan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern. Tanggal 1/2/2010 no 1.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2012-2032. No 24 2012.
3. Pajak Penerangan Jalan. Nomor 22 Tahun 2006
4. Terminal Dan Retribusi Terminal Dalam Kabupaten Daerah. Nomor 5 2007.
5. Perda Kabupaten Bungo nomor 2 tahun 2008. Tentang penyelenggaraan pendidikan dasar gratis.
6. Perda tahun 2010 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis Efektifitas PAD dan upaya peningkatannya di kabupaten bungo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas Pendapatan Asli Darah (PAD) di Kabupaten Bungo dari tahun 2007-2011 mempunyai nilai yang berprestasi. Selama kurun waktu enam tahun tersebut PAD memberikan rata-rata tingkat efektifitas sebesar 538,65 % yang termasuk dalam katagori cukup efektif dan mempunyai keterangan belum terealisasi.
2. Upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bungo yaitu dengan cara peningkatan kualitas pelayanan, menarik investor untuk berinvestasi, melakukan dan penurunan reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar retribusi serta serta peningkatan

pelayanan perizinan pada badan penanaman modal dan perizinan, membenahi manajemen dan penerimaan PAD, peningkatan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan struktur perdagangan dan jasa sebagai sektor andalan, mengembangkan industri berbasis sumber daya dan karakteristik lokal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Melihat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pendapatan lain yang sah terhadap PAD yang memberikan kontribusi yang terbesar adalah pendapatan lain yang sah, maka hendaknya pemerintah kabupaten Bungo harus terus diarahkan pada usaha-usaha terus meningkat.
2. Pemerintah kabupaten Bungo harus terus meningkatkan kinerja dengan cara pendataan kembali Pendapatan Asli Daerah, agar potensi-potensi yang baru, baik di pajak daerah, retribusi daerah dapat terdata kembali dan mempermudah cara memungut pajak daerah, perizinan, dan lain-lain.
3. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang tepat akan mengarahkan kepada perkembangan daerah dan peningkatan PAD, tetapi tidak hanya pembuatan kebijakan pembuatan semata untuk mengatasi masalah yang ada tetapi realisasi dari kebijakan tersebut.
4. Menarik investor untuk berinvestasi pada potensi kabupaten Bungo, seperti dibidang perdagangan, perhotelan dan restoran.
5. Melakukan penertiban dan penurunan reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar retribusi, serta peningkatan pelayanan perizinan padapenanaman modal. Dalam upaya ini pemerintah kabupaten Bungo membentuk tim perizinan yang sering merazia tempat hiburan, gudang, ruko, tower, dan bangunan lain untuk memastikan perizinannya sudah dilengkapi. Jika bangunan banyak tidak berizin hal ini bisa mengurangi potensi PAD dari sector perizinan.
6. Pemerintah kabupaten Bungo mengoptimalkan penerimaan daerah dengan membenahi manajemen dan penerimaan PAD, dan meningkatkan penerimaan ninkovensial. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap pweraturan daerah. menetapkan target penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan.
7. Peningkatan produktivitas sector pertanian dan pengeluaran produk agro industri, pungutan kontribusi sector industry terhadap PDRB, pengembangan ekowisata, wisata budaya, peningkatan pemanfaatan energi alternatif. Persyaratan dalam implementasinya adalah ketersediaan infrastrukturnya fisik yang memadai, peningkatan pengetahuan dan slill pelaku ekonomi, peningkatan kelembagaan.
8. Perluasan akses pasar bagi produk kabupaten Bungo.
9. Mengembangkan industry berbasis sumber daya dan karakteristik lokal difokuskan pada pengembangan industri berbasis pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- AntoDajan. 1996. PengantarMetodeStatistikJilid II. CetakanKedelapanBelas. Jakarta : PT Pustaka LP3ES
- Ahmad Raja Nasution, *Strategi PeningkatanPendapatanAsli Daerah (PAD) DalamPelaksanaanOtonomi Daerah*. Medan.
- Ahmad Sofwani, *MobilisasiSumber-sumberPendapatanAsli Daerah (PAD) DalamRangka Pembangunan Daerah*. MuaraInim.
- Ahmad Yani, S.H., M.M., Ak., *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan*

Daerah Di Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, April, 2004.

Darise Nurlan, 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ke-dua.PT.Macanan Jaya Cemerlang. Jakarta.

Fredlaen der dan Due, 1994. *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*. TerjemahandariSitompul.Erlangga. Jakarta.

Halim Abdul danTheresia. 2007., *manajemen keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah* (edisikedua) Yogyakarta: UPP AMPYKPN